KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL
(Studi Pada Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo)

(Skripsi)

Oleh

Nosi Marisa

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL
(Studi Pada Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo)

Oleh:

Nosi Marisa

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan kewenangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tetapi pada kenyataannya masih terdapat desa tertinggal karena masih mengalami ketimpangan pembangunan pada pelayanan dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi ketimpangan pembangunan dan kebijakan yang tepat dalam melaksanakan pembangunan desa tertinggal terutama Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat. Metode yang dipergunakan dalam penelitain ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori struktural fungsional Talcot Parsons. Hasil penelitian berdasarkan konsep **AGIL** menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa tertinggal pada indeks pelayanan dasar hanya 11,96 disebabkan karena terdapat kekurangan dari segi Adaptasi ***(Adaptation)***, pekerjaan masyarakat seluruhnya sebagai petani kopi hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak cukup untuk pendidikan dan kesehatan, produksi masyarakat hanya sedikit dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, ekonomi masyarakat masih dihasilkan pertahun dari pekerjaannya, hanya ada program kesehatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan kurang lengkap. Untuk mencapai Tujuan ***(Goal)*** masyarakat berpartisipasi aktif tetapi masih kurang berinisiatif untuk bekerjasama dengan pihak lain dan kurangnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk Integrasi ***(Integration)***, pemerintah desa berkoordinasi dengan baik tetapi tidak didukung dengan pemenuhan integrasi adaptasi, tujuan dan Pemeliharaan pola ***(Latency)***dalam pendidikan sudah cukup baik tetapi untuk kesehatan masih kurang pemahaman, kebijakan yang tepat adalah pembangunan akses jalan dan peningkatan fasilitas pendidikan.

Kata kunci: Pembangunan, Desa Tertinggal, AGIL

ABSTRACT

INEQUALITY DEVELOPMENT OF UNDERDEVELOPED VILLAGE
(Study On Atar Kuwau Village and Argomulyo Village)

By:

Nosi Marisa

The implementation of village development is the authority of the village which is implemented by the village government but in reality there are still underdeveloped villages because of inequality development on base services. The purpose of this study was to find out the reason about why the inequality development happen and to find out which one the right policeto implementing the development of underdeveloped villages, especially in Pekon Atar Kuwau, Ketulis in West Lampung regency. The method used in this research is descriptive with qualitative approach and using functional structural theory by Talcot Parsons. The results based on **AGIL** concept showed that the implementation of development of underdeveloped village on the basic service index is only 11.96 due to the lack of **Adaptation**, the whole community work as a coffee farmer can only buy basic needs and not enough for education and health service, community's production is minimum can't buy daily needs of them, community's economy is getting just by year from their job, there is health and education service also facilities there, but isn't complete well. To achieve the **Goal,** the community actively participates but still lacks motivation to cooperate with other parties and lacks of education and health service also facilities, meanwhile on Integration, village government is cordinating well but not supported by the fulfillment of adaptation of integration, **Latency** in education is good enough but on health is still lack of understanding, the right policy is the make the road access better and improve the education service also facilities.

Keywords: Development, Underdeveloped Village, AGIL

KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL
(Studi Pada Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo)

Oleh

NOSI MARISA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi	: **KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL (Studi Pada Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo)**
Nama Mahasiswa	: *Nosi Marisa*
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1416021078
Jurusan	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.	**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**
NIP 19640508 199303 1 004	NIP 19690219 199403 2 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.** .....

Sekretaris : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.** .....

Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya, M.Si.
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Maret 2018**

PERNYATAAN

Dengan karya ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 6 April 2018

METERAI TEMPEL 93A85AEF983651809 6000 ENAM RIBU RUPIAH

g membuat pernyataan

Nosi Marisa
NPM. 1416021078

MOTTO

"Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus'aha"
"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya"
(QS Al-Baqarah 2:286)

"Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkanmu,
belajarlah merendah sampai tak seorangpun yang bisa merendahkkanmu"
(Gobind Vashdev)

"Kesombongan adalah penghancur terbesar"
Nosi Marisa

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nosi Marisa, dilahirkan di Liwa, 12 November 1996. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Isrin dan Ibu Cik Nalis. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tahun 2001-2002 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Lampung Barat, dilanjutkan di SDN 1 Sebarus Lampung Barat pada tahun 2002-2008. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Liwa tahun 2008-2011 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Liwa tahun 2011-2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa jursan Ilmu Pemerintahan tahun 2014.Selama masa perkuliahan penulis pernah berhimpun dalam organisasi, penulis pernah menjadi Anggota Muda LSSP Cendekia FISIP Unila tahun 2014-2016 dan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Bina Karya Buana, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamduillahirabbil'alamiin telah Engkau RidhaiYa Allah langkah hambaMu,
Sehingga Skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan tepat waktu

Teriring Shalawat Serta Salam Kepada Nabi Muhammad SAW
Semoga Kelak Skripsi ini dapat Memberikan Ilmu yang Bermanfaat

dan

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik-adikku yang kusayangi sebagai tanda bakti, hormat dan cintaku.
Terimakasih atas doa dan restu serta semangat yang telah kalian berikan.

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan,
Semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah milik allah SWT atas segala nikmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Ketimpangan Pembangunan Desa Tertinggal (Studi Pada Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo)" sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Isrin dan Ibunda Cik Nalis serta adikku Nesti Anggiya dan Metri Andayni untuk doa, dukungan, jerih payah dan kasih sayang kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan kasih sayang-Nya untuk Ibunda dan Ayahanda.
2. Paman dan bibi.Terima kasih untuk setiap doa, kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih untuk tenaga yang telah diberikan dalam setiap mencari informan dan untuk perjalanan yang sulit dilalui. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan kesehatan untuk paman dan bibi.

3. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat, saran, bimbingan dan motivasi serta kesabaran dalam memberi arahan kepada penulis hingga terciptanya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku pembimbing kedua. Terima kasih atas kesabaran untuk meluangkan waktu dalam menghadapi penulis, atas segala bimbingan ilmu, saran yang sangat bermanfaat serta motivasi dan semangat, sehingga atas kebaikan ibu, penulis mampu menyelesaikan skripsi .Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak baik di dunia ataupun di akhirat kelak.
6. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H. selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas semua bimbingan, saran, masukan serta kebaikannya yang telah bapak berikan sejak penulis menjadi mahasiswa baru hingga selesainya skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada bapak.
7. Seluruh dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mampu menjadi jendela wawasan bagi penulis di masa kini dan di masa yang akan datang. Semoga segala kebaikan

dari Allah SWT selalu tercurah untuk bapak dan ibu baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

8. Drs. Sarwoko, M.Si dan Ibu Yuni artini. Terima kasih paman dan bibi atas segala kebaikan kalian, atas semangat dan motivasi dan kemandirian yang telah kalian tanamkan selama perkuliahanku, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindunganya kepada keluarga kalian.
9. Informan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, Pemerintah Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo. Terima kasih atas segala kebaikan dan kesediaan bapak dan ibu dalam memberikan data serta waktu yang telah diluangkan untuk menjawab seluruh pertanyaan penulis jika penulis kekurangan data dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak dan ibu.
10. Terima kasih banyak kepada M. Ikhsan Taufik yang telah menemani penulis dari saat perkuliahan hingga skripsi, terima kasih untuk kesabaran, kebaikan dan seluruh pengertian, semoga kesuksesan adalah balasan untuk setiap kebaikanmu dan semoga Allah SWT selalu melindungimu dimanapun berada.
11. Teman baikku, teman seperjuangan sejak mahasiswa baru sampai sekarang dan sampai nanti, Shinta Silvia Noviana. Terima kasih untuk segala kebaikan, perhatian dan semua yang telah diberikan untuk penulis selama masa perkuliahan, semoga segera selesai skripsinya dan sukses selalu untukmu, semoga Allah SWT senantiasa melindungimu dimanapun berada.
12. Iranda Putri, Aziza Novirania, Dita Maharani, Gita Pratiwi E, Nurul Fatia, M. Wiryawan Saputra, Dhian Kurniawan, M. Dhian Bagus A, M.Dhean Pratama. Terima kasih telah menjadi teman dan bagian dari perjalanan kuliahku,

tempat berbagi cerita, bertukar ilmu, dan bermain. Terima kasih untuk semua kebaikan dan waktu luang yang telah diberikan, semoga kita bisa sukses bersama. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun berada, *See You On Top*.

13. Sepupu-sepupu, terima kasih untuk semua kasih sayang dan doanya. Dewi, Elsa, Zahra, Tika, Destri, Feni, Via, Deni dan semua sepupu-sepupuku tanpa terkecuali. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua.
14. Teman-teman satu rumah. Erwinda, Reka, Lucky, Rizky, Ibu Cris, Bapak Cris, Mas Deska dan Mas Vika. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kebersamaan yang telah teman-teman berikan, semoga Allah SWT memberikan kesuksesan untuk kita. Terima kasih bapak dan ibu telah menjadi orang tua keduaku selama di perantauan, atas semua doanya, pengertian dan kasih sayangnya, terima kasih telah menjadi pelindungku selama di perantauan semoga Tuhan Yesus selalu melindungi kalian.
15. Mba-mba dan abang-abang di jurusan Ilmu Pemerintahan, Restiani Damayanti, S.IP, M.Irfan S.IP, Nurkalim S.IP, Winda Dwiastuti Herman S.IP, serta seluruh abang dan mba yang tidak dapat disebutkan satu-satu, terima kasih atas segala kenangan dan kebaikan terima kasih atas waktu, ilmu, motivasi dan keceriaan yang diberikan.
16. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2014, Mike Nurjanah, Silvi, Nurul A Hapsari, Abu Yusri, Yusuf, Ahmad Ridwan, Intan, Miss Retno, Debby, Fira, Ana, Elvina, Ade, Sandi, Yudi, dan seluruh angkatan 2014. Terimakasih untuk semua kebaikan, kenangan dan bantuan yang telah teman-teman

berikan, semoga kesuksesan menghampiri kita dan semoga Allah SWT kelak akan membalas semua kebaikan kalian.

Bandar Lampung, 6 April 2018

Nosi Marisa

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 13
C. Tujuan penelitian 13
D. Kegunaaan Penelitian 14

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Pemerintah Desa 15
B. Pembangunan 18
C. Pelayanan Dasar 24
   1. Pelayanan Pendidikan 24
   2. Pelayanan Kesahatan 28
D. Desa 34
   1. Pembangunan Desa 35
   2. Prinsip Pembangunan Desa 36
E. Desa Maju dan Tertinggal 37
F. Teori Struktural Fungsional 40
G. Kerangka Pikir 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian 45
B. Fokus Penelitian 46
C. Jenis Data 47
   1. Data Primer 47
   2. Data Sekunder 48
D. Penentuan Informan 48
E. Teknik Pengumpulan Data 50
   1. Wawancara 50

2. Observasi 51
3. Dokumentasi 52
F. Teknik Pengolahan Data 52
G. Teknik Analisis Data 53
1. Reduksi Data 53
2. Penyajian Data 53
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 54
H. Teknik Validasi Data 54

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Pekon Atar Kuwau 58
1. Luas Tanah 60
2. Kesejahteraan Keluarga 60
3. Sarana Pendidikan 61
4. Sarana Kesehatan 62
B. Gambaran Umum Pekon Argomulyo 62
1. Luas Tanah 64
2. Kesejahteraan Keluarga 65
3. Sarana Pendidikan 65
4. Sarana Kesehatan 66

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil 68
1. Pekon Atar Kuwau 69
2. Pekon Argomulyo 93
3. Kebijakan untuk Desa Tertinggal 122
B. Pembahasan 128
1. Adaptasi *(Adaptation)* 129
2. Tujuan *(Goal)* 141
3. Integrasi *(Integration)* 144
4. Pemeliharaan Pola *(Latency)* 148

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan 154
B. Saran 155

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1. Desa teringgal Kabupaten Lampung Barat 4
2. Data Pembangunan Pekon Atar Kuwau 6
3. Data Pembangunan Pekon Argomulyo 10
4. Penelitian terdahulu 12
5. Variabel Infrastruktur 21
6. Variabel Transportasi 22
7. Variabel Pelayanan Publik 23
8. Variabel Penyelenggaraan Pemerintahan 23
9. Masyarakat, Subsistemnya dan imperatif fungsionalnya 41
10. Data Informan 50
11. Luas Tanah Berdasarkan Sawah dan Bukan Sawah 60
12. Kesejahteraan Keluarga Pekon Atar Kuwau 60
13. Data Penduduk yang BerpendidikanPekon Atar Kuwau 61
14. Luas Tanah Berdasarkan Sawah dan Bukan Sawah 64
15. Kesejahteraan Keluarga Pekon Argomulyo 65
16. Sarana Pendidikan 65
17. Data Penduduk yang Berpendidikan Pekon Argomulyo 66
18. Data Sosialisasi Kesehatan 67
19. Kesejahteraan keluarga 74
20. Usia anak sekolah Pekon Atar Kuwau 78
21. Masyarakat Berpendidikan 92
22. Kesejahteraan Keluarga 97
23. Usia Anak Sekolah Pekon Argomulyo 102
24. Observasi Sosialisasi Kesehatan 106
25. Masyarakat Berpendidikan Pekon Argomulyo 115
26. Triangulasi Data 117
27. Perbandingan pekerjaan masyarakat 129
28. Perbandingan Produksi Pekon 132
29. Perbandingan ekonomi pekon 134
30. Perbandingan alokasi dan program pekon 137
31. Perbandingan kebutuhan masyarakat pekon 140
32. Perbandingan mobilisasi aktor dan sumber daya 141
33. Perbandingan koordinasi pekon 144
34. Perbandingan nilai dan norma 148

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar

1. Kerangka Pikir 44
2. Peta Pekon Atar Kuwau 59
3. Peta Pekon Argomulyo 63
4. Keadaan Lokasi Perkebunan Kopi 72
5. Rapat Rutin Pekon Atar Kuwau 82
6. Pembangunan Jalan (Kaur Pembangunan & masyarakat) 83
7. Keadaan Lokasi Perkebunan Kopi 95
8. Bangunan TK yang akan dibangun 101

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah serta memiliki otonomi karena desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang desa tercantum bahwa kewenangan desa meliputi, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.

Wewenang pemerintah desa yang berlandaskan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 memiliki salah satu tugas yaitu melaksanakan pembangunan desa. Untuk melaksanakan wewenang pemerintahan desa dalam bidang pembangunan desa dibutuhkan pemerintah desa, pemerintah desa seperti dijelaskan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25 menyatakan bahwa kepala desa dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat desa menurut pasal 48 terdiri dari sekertariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Pemerintah desa mula-mula dibentuk agar keputusan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sistematis.

Pemerintahan yang baik akan bermanfaat bagi terciptanya pembangunan desa, jika pemerintah mempunyai birokrasi yang tanggap, sistematis dan efisien, hal ini diperjelas oleh Kessa (2015:10) bahwa membangun kemandirian desa dalam kerangka desa membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Proses perencanaan yang baik dengan tata kelola program yang baik dapat dapat dilaksanakan agar tidak terjadi ketimpangan dalam rangka mewujudkan pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu wewenang dari pemerintah desa, oleh sebab itu pembangunan merupakan tanggung jawab pemilik wewenang dan dalam pelaksanaannya pemilik wewenang tersebut ialah pemerintah desa, berdasarkan Riyadi (dalam Mardikanto dan Prabowo, 2013:3) pembangunan merupakan usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan dan mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Pembangunan dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan tidak ada ketimpangan dalam hal-hal yang mendukung pembangunan. Untuk melaksanakan proses pembangunan tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat agar pembangunan dapat terwujud dan terarah. Arah penentuan pembangunan tersebut dalam Syahza (2012:3) adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pembangunan desa sesuai dengan

pengelolaannya dan menitik beratkan pada pemerintah yang ada di desa tersebut.

Usaha atau proses perubahan untuk mencapai tingkat kemakmuran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, karena pelaksanaan pembangunan harus memenuhi lima aspek pembangunan dasar yang disebut dimensi pembangunan desa. Bulkin dkk (2015:6), lima dimensi indeks pembangunan desa yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjadi desa maju maka tidak ada ketimpangan antara lima dimensi tersebut, apabila lima dimensi tersebut sudah terpenuhi tetapi pengelolaan belum terpenuhi maka masih disebut desa berkembang tetapi jika lima dimensi tersebut belum terpenuhi maka masih menjadi desa tertinggal.

Suatu desa merupakan desa tertinggal, untuk mewujudkan pembangunan desa tertinggal perlu dilakukan usaha lebih maksimal daripada desa yang sudah tergolong berkembang atau maju, karena pada desa tertinggal masih memiliki beragam masalah terutama pada ketimpangan-ketimpangan pembangunan sehingga diperlukan usaha yang lebih untuk mengatasi hal-hal yang menyebabkan desa tersebut tertinggal dan mengapa terjadi demikian.

Tabel 1 Desa tertinggal Kabupaten Lampung Barat

Provinsi	Kabupaten/kota	Kecamatan	Desa	Indeks Pembangunan Desa	Indeks Pelayanan Dasar	Indeks Kondisi Infrastruktur	Indeks Aksesibilitas/ Transportasi	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Penyelenggaraan pemerintahan
Lampung	Lampung Barat	Bandar Negeri Suoh	Ringin Jaya	40.14	35.57	31.51	57.77	62.23	18.72
			Suoh	52.69	65.99	27.88	54.72	62.23	56.94
			Tanjung Sari	40.69	38.76	28.01	57.82	62.23	22.15
			Bandar Agung	51.66	64.77	28.68	46.94	74.82	51.26
			Tembelang	39.12	36.01	25.02	58.20	62.23	22.15
		Batu Brak	Teba Liokh	47.73	63.57	26.49	63.23	49.65	18.50
		Batu Ketulis	**Atar Kuwau**	**35.10**	**11.96**	**28.59**	**67.16**	**49.65**	**44.94**
			Argomulyo	**55.22**	**59.64**	**31.57**	**72.89**	**62.23**	**56.70**
			Sumber rejo	36.63	14.07	30.14	71.35	49.65	41.29
		Lumbok seminung	Ujung	35.94	26.54	30.53	61.50	49.65	15.07
			Suka Banjar	50.34	61.53	21.36	61.84	56.10	56.70
			Tawan Suka Mulya	38.69	37.89	16.60	63.55	62.23	22.15
			Lombok Timur	44.67	54.29	27.60	60.07	56.10	15.07
		Pagar Dewa	Pagar Dewa	41.32	37.25	24.93	61.76	68.68	25.80
			Suka Mulya	42.59	39.37	21.05	59.17	68.68	44.94
		Sukau	Teba Pering Raya	42.20	48.18	21.08	60.68	62.23	18.50
		Suoh	Suka Marga	41.94	37.31	28.22	49.96	62.23	52.24
			Tugu Ratu	48.39	41.27	26.92	55.17	87.41	67.65
			Sido rejo	36.74	27.13	22.48	53.70	62.23	41.29

Sumber : Kemendesa 2016

Berdasarkan tabel tersebut, data desa tertinggal yang tersaji menjadi landasan awal lokasi pada penelitian dan berdasarkan penetapan wilayah tertinggal, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menetapkan sebanyak 122 kabupaten di Indonesia sebagai daerah tertinggal pada 2015-2019 dan Provinsi Lampung salah satunya Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan data desa yang paling tertinggal adalah Pekon Atar Kuwau yang terletak di Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, desa ini paling tertinggal karena Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada desa tersebut yang paling rendah diantara desa-desa lainnya yaitu hanya mencapai 35.10. indeks pelayanan dasar hanya mencapai 11.96, pada indeks kondisi infrastruktur 28.59, selanjutnya indeks aksesibilitas/transportasi sudah tinggi karena mencapai 67.16 dan indeks pelayanan publik 49.65 dan yang terakhir adalah indeks penyelenggaraan pemerintahan 44.94.

Data tersebut menjelaskan bahwa indeks transportasi, indeks pelayanan publik, kondisi Infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahnya sudah cukup tinggi untuk mendukung kemajuan desa. Tetapi, di sisi lain indeks pelayanan dasar masih rendah, sehingga masih terjadi ketimpangan antara lima dimensi indeks pembangunan desa tersebut, ketimpangan yang terjadi pada lima dimensi indeks pembangunan mengakibatkan desa tersebut tergolong desa tertinggal.

Tabel 2 Data Pembangunan Pekon Atar Kuwau

Pelayanan Dasar	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pemerintahan	Infrastruktur	Transportasi
1. Satu Sekolah Dasar Swasta 2. Satu pustu	1. terbatasnya sarana dan prasarana pekon, misal dalam kesehatan ada sarana tetapi tenaga kesehatan tidak selalu di tempat dan pendidikan sarananya minim. 2. Administrasi pekon masih manual sehingga masih kurangnya dokumentasi yang dibutuhkan warga. 3. pelayanan publik dalam misal dalam pembuatan ktp, kk, izin usaha, akta kelahiran hanya pembuatan pengantar saja di desa selebihnya ada pada tingkat kecamatan sehingga lama prosesnya 4. fasilitas olahraga (Lapangan Voli, lapangan badminton, dan tenis meja	1. kelengkapan pemerintahan pekon (terdapat 6 Kaur di Pekon Atar Kuwau) 2. otonomi desa, hanya ada Badan Usaha Milik Desa BUMDES 3. kekayaan desa (Kopi) 4. kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa dan sekertaris desa pendidikan terakhir SLTA	1. Tidak terdapat penginapan 2. Tidak terdapat pasar, pertokoan, bank maupun rumah makan 3. Masyarakat menggunakan listrik dari PLT Mikro Hidro dan sumber air berasal dari PDAM	1. Akses jalan masih tanah dan rabat beton hancur.

Sumber: Data Pekon Atar Kuwau 2017

Data di ataas menunjukkan keadaan Pekon Atar Kuwau, terlihat bahwa pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, infrastruktur dan transportasi sudah cukup baik, tetapi pada pelayanan dasar masih sangat kurang terlebih di bidang kesehatan, tetapi di balik banyak kekurangan yang terdapat di desa tersebut, terdapat pula potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk kemajuan desa seperti kopi dan lada, tanaman tersebut merupakan potensi yang dapat membantu kemajuan desa tersebut jika diupayakan pembudidayaannya.

Kemajuan desa dapat dicapai jika lima dimensi pembangunan tersebut merata dan tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh dari lima dimensi tersebut. Selain itu rendahnya pelayanan dasar menunjukkan masih rendahnya kinerja pemerintah desa dalam mengupayakan pencapaian pada indeks pelayanan dasar.

Kemajuan yang lebih banyak dibanding kekurangan dapat menutupi kekurangan pada pembangunan, tetapi hal tersebut tidak terjadi di Pekon Atar Kuwau sehingga menyebabkan tertinggalnya desa tersebut, karena itu perlu diteliti kebijakan seperti apa yang dapat meningkatkan pembangunan desa terutama bagaimana pemerintah desa sebagai aktor utama menjalankan kewenangan dalam pembangunan desa. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 untuk tahun 2017 bahwa pelayanan dasar pada bidang kesehatan di Pekon Atar Kuwau sama sekali tidak ada pelayanan kesehatan sedangkan pada bidang pendidikan menurut data kementrian pendidikan, data satuan

pendidikan di Desa Atar Kuwau hanya terdapat satu Sekolah Dasar (SD) swasta.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa (Peratin) Pekon Atar Kuwau, Bapak Tri Ariyogi pada hari senin tanggal 30 Oktober 2017 melalui telepon, yang menyatakan bahwa:

> "Pekon Atar Kuwau hanya memiliki Sekolah Dasar Swasta (SDS) dan hanya ada satu puskesmas pembantu, pada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) hanya ada pelayanan dasar pada bidang kesehatan yaitu pelatihan kader posyandu, sedangkan untuk pendidikan tidak ada "

Pekon Argomulyo sebagai contoh desa yang pelayanan dasar sudah cukup baik di Kecamatan Batu Ketulis antara desa-desa lain indeks pembangunan desa ini paling tinggi dengan Indeks Pembangunan Desa (IPD) pada Pekon Argomulyo yaitu mencapai 55.22 indeks pelayanan dasar mencapai 59.64, pada indeks kondisi infrastruktur 31.57, selanjutnya indeks aksesibilitas/transportasi sudah tinggi karena mencapai 72.89 dan indeks pelayanan publik 62.23 dan yang terakhir adalah indeks penyelenggaraan pemerintahan 56.70.

Pelayanan dasar dalam bidang kesehatan dan pendidikan di Pekon Argomulyo, dalam bidang kesehatan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 untuk 2017 pada Pekon Argomulyo hanya terdapat 1 puskesmas sedangkan untuk pelayanan kesehatan lainnya masih belum ada sedangkan pada bidang pendidikan Pekon Argomulyo menurut data kementerian pendidikan terdapat satu Taman Kanak-kanak (TK), satu

Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan terdapat satu Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa (Peratin) Pekon Argomulyo pada tanggal 9 November 2017, menyatakan bahwa :

> “Fasilitas pendidikan sudah hampir lengkap hanya kurang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sedangkan untuk kesehatan sudah ada bidan dan puskesmas pembantu “

Tabel 3 Data Pembangunan Pekon Argomulyo

Pelayanan Dasar	Pelayanan Publik	Penyelenggaraan pemerintahan	Infrastruktur	Transportasi
1. Satu Taman Kanak-kanak, Satu Sekolah Dasar Negeri, Satu Sekolah Menengah Pertama Negeri 2. Terdapat satu puskesdes dan satu pustu	1. Jauhnya jarak dari pekon ke kecamatan 16Km sehingga layanan kesehatan dan pendidikan susah untuk dapat pelayanan lebih baik.. 2. Administrasi Pekon sudah menggunakan komputer sehingga bisa lebih mudah mendapatkan data. 3. pelayanan publik dalam misal dalam pembuatan ktp, kk, izin usaha, akta kelahiran hanya pembuatan pengantar saja di pekon selebihnya ada pada tingkat kecamatan sehingga lama prosesnya 4. fasilitas olahraga (Lapangan Voli 5)	1. kelengkapan pemerintahan desa (terdapat 6 Kaur di Pekon Argomulyo) 2. Otonomi desa, hanya ada Badan Usaha Milik Desa BUMDES (koperasi simpan pinjam) 3. kekayaan desa (Kopi) 4. kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepala desa dan sekertaris desa pendidikan terakhir SLTA dan S1	1. Satu pasar, dua penginapan dan tidak ada toko besar. 2. Masyarakat menggunakan listrik dari PLN dan sumber air berasal dari PDAM dan saluran dari sungai	1. Akses jalan rabat beton

Sumber: Data Pekon Argomulyo 2017

Data di atas menunjukkan keadaan Pekon Argomulyo, terlihat bahwa pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan, infrastruktur dan transportasi, dan pelayanan dasar sudah lebih baik dibandingkan dengan Pekon Atar Kuwau, hanya jauhnya jarak antar pekon ke kecamatan yang jauh serta akses menuju lokasi transportasi umumnya masih sangat minim sehingga untuk menuju lokasi dibutukan kendaraan pribadi atau ojek motor.

Pembangunan desa dapat terlaksana semuanya bergantung pada peran pemerintah desa, tujuan perbandingan Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo, agar dapat dibuktikan pelaksanaan pembangunan desa terutama dibidang pelayanan dasar karena Pekon Argomulyo indeks pelayanan dasarnya lebih tinggi dibandingkan Pekon Atar Kuwau dan pada Pekon Atar Kuwau terdapat ketimpangan pembangunan, sehingga jika dibandingkan diharapkan dapat ditemukan penyebab ketimpangan pada pembangunan desa dan kebijakan seperti apa yang tepat untuk pembangunan desa tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan tetap menjaga nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat maka hal ini akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri dan hal tersebut terdapat dalam teori struktural fungsional yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola.

Dijelaskan oleh Parsons (dalam Mardikanto dan Prabowo, 2013:9) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial. Pembangunan desa adalah wewenang pemerintah desa. Sorotan awal adalah desa yang telah ditetapkan sebagai desa tertinggal

karena rendahnya pelayanan dasar serta kebijakan seperti apa yang tepat untuk mengatasi ketertinggalan tersebut.

Berdasarkan ulasan di atas penulis bermaksud mengangkat judul Ketimpangan Pembangunan Desa Tertinggal (Studi Pada Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo).

Berdasarkan penelitian terdahulu dalam hal pembangunan yang akan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Jenis dan tahun	Judul
1.	Melyansyah	2016	ANALISIS PEMBANGUNAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN KABUPATEN PRINGSEWU (Studi Komparatif dari Perspektif Capability Approach Amartya Sen)
2.	Chici Aprianita Sinaga	2017	EFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUAI JURAI DALAM PENGENTASAN DESA TERTINGGAL (Studi Kasus Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)

Sumber: Diolah peneliti

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah, penelitian pertama menguji teori Amartya Sen dan membandingkan pembangunan dua kabupaten dalam penelitiannya dan menggunakan jenis dan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif , penelitian kedua meneliti tentang

pembangunan desa yang berlandaskan program desa dan mengetahui bagaimana pelaksanaan program terebut. Sedangkan untuk penelitian yang akan diteliti ini peneliti bermaksud meneliti penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan berdasarkan teori struktural fungsional. Dengan menggunakan jenis dan tipe penelitian deskriptif kualitatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang diteliti mengenai "Ketimpangan Pembangunan Desa Tertinggal (Studi Pada Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo)". Sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi ketimpangan pembangunan pada bidang pelayanan dasar di Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat?
2. Apakah kebijakan yang tepat untuk melaksanakan pembangunan desa tertinggal ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dua desa tertinggal untuk menemukan kebijakan yang tepat bagi kedua desa tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi pemikiran dalam mengkaji dan memahami bahwa untuk menjadi desa maju dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat sebagai penunjang kemajuan desa tertinggal.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran bagi pihak desa tentang hal-hal yang harus dilakukan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan desa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 tentang desa tercantum bahwa kewenangan desa meliputi, kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal - usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa:

1. Kepala desa

   Dalam struktur masyarakat desa sangat besar, hal ini karena kebanyakan desa-desa di Indonesia masyarakatnya masih bercorak paternalistik. Oleh karena itu apa yang dianggap baik dan benar, yang dianjurkan, yang dikatakan dan dilakukan oleh kepala desa merupakan pedoman dan contoh langsung bagi “anak buahnya”. Untuk melakukan tindakan yang sama. Seorang kepala desa, mempunyai kekuasaan dan wewenang yang besar untuk mengatur rakyatnya. Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembanguan, kepala desa juga mempunyai kewajiban

lain yaitu menyelenggarakan urusan dibidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mebina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong royong masyarakat.

Adapun peran kepala desa dalam pembangunan menurut Tjokroamidjojo (dalam jurnal *ilmu pemerintahan*, 2015) yaitu sebagai berikut :

a. Motivator yaitu fungsi pemerintah desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

b. Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberi bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan Desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

c. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa mempunyai wewenang :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa
d. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
e. Membina kehidupan masyarakat Desa
f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
g. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta menginetrgasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
l. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
m. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
n. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang Dalam menjalankan fungsinya

2. Perangkat desa, dalam melaksanakan wewenangnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa Perangkat desa menurut undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 pasal 48 meliputi:

   a. Sekretariat desa

   b. Pelaksana kewilayahan

   c. Pelaksana teknis

B. Pembangunan

Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri Riyadi (dalam Mardikanto dan Prabowo, 2013:3) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah pada suatu kesepakatan bahwa: pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan dan mutu hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Terkait dengan kajian tentang pembangunan Muhi et. Al (dalam Mardikanto dan Prabowo, 2013:9) menemukakan beberapa pendekatan teoritis sebagai berikut:

1. Teori evolusi, yang mengacu kepada evolusi peradaban yang dikemukakan oleh Charles Darwin yang menyebutkan bahwa setiap komunitas akan mengalami perubahan dari kehidupan yang sangat sederhana ke arah yang semakin kompleks, sebagai akibat dari perubahan sosial, ekonomi, kependudukan, geografi, rasial, teknologi maupun ideologi.
2. Teori perubahan sosial dari Emile Durkheim (1964) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi sebagai akibat adanya perubahan struktur sosial dalam bentuk “pembagian kerja”.
3. Teori struktur fungsional dari Persons (1851) yang mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam:
   a. Adaptasi terhadap kebutuhan situasional
   b. Pencapaian tujuan-tujuan
   c. Integrasi atau pengaturan tata hubungan
   d. Pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu.
4. Teori ekonomi Gunar Mirdal (1970) mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena beberapa kondisi ekonomi yang mencakup
   a. Hasil dari pendapatan
   b. Tingkat produktivitas
   c. Tingkat kehidupan
   d. Sikap dan pranata
   e. Rasionalitas
5. Teori konflik yang dicetuskan oleh Karl Mark (1919-18883) yang menyatakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya konflik atau

pertentangan kepentingan ekonomi antara kelas pemodal dan kelas yang tertindas.
6. Teori ekologi yang dikemukakan oleh Odum (1971) tentang hubungan antar manusia dengan lingkungannya (fisik dan sosial).
7. Teori ketergantungan yang berkembang di Amerika Latin sebagaimana dilaporkan oleh Frank (Wilber, 1979) dimana negara maju mendominasi negara yang belum berkembang.

Dalam pembangunan tentunya ada pelaku-pelaku yang berperan dalam melaksanakan pembangunan, pelaku-pelaku Pembangunan Menurut Schrahman dan Lener (dalam Mardikanto dan Prabowo, 2013:22) mengungkapkan bahwa di dalam setiap proes pembangunan pada dasarnya terdapat dua kelompok atau sub sistem pelaku pembangunan yang dimaksud dengan sub sistem pemerintah dan penggerak adalah semua aparat pemerintah, penyuluh, pekerja sosial, tokoh-tokoh masyarakat, aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terlibat dan berkewajiban untuk:

1. Bersama warga merumuskan dan mengambil keputusan dan memberikan legitimasi tentang kebijakan dan perencanaan pembangunan
2. Menginformasikan atau menerjemahkan kebijakan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.
3. Mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat.
4. Bersama masyarakat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan
5. Mengupayakan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh warga masyarakat.

Sedang yang dimaksud dengan sub sistem masyarakat atau pengikut, adalah: sebagian besar warga masyarakat yang tidak termasuk dalam sub sistem pemerintah/penggerak di atas, yang berkewajiban untuk:

1. Menyampaikan ide atau gagasan tentang kegiatan pembangunan yang pelu dilaksanakan dan cara mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
2. Secara positif menerima dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan.
3. Memberikan masukan ataupun umpan balik tentang kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan.
4. Menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Dalam pembanguna terdapat lima indeks pembangunan yaitu:

1. Pelayanan Dasar

   Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 12 yang berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

   a. Pendidikan
   b. Kesehatan
   c. pekerjaan umum dan penataan ruang
   d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
   e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
   f. sosial

2. Infrastruktur

   Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional, telah diyakini bahwa untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas perlu dilakukan dengan reformasi pembangunan melalui serangkaian rencana tindak berupa revisi peraturan peningkatan alokasi anggaran pemerintah dan memperbesar kesempatan bagi pemerintah daerah dan swasta untuk membangun infrastruktur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Infrastruktur adalah segala sesuatu yg merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb) atau prasarana.

Menurut Kolstad dan Village (dalam Susantono, 2009:10) infrastruktur adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat menjadi pemacu pembangunan, sebab ekonomi yang baik dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan, infrastruktur terdiri dari beberapa variabel seperti data di bawah ini

Tabel 5 Variabel Infrastruktur

Dimensi	Variabel
Kondisi infrastruktur	Infrastruktur ekonomi
	Infrastruktur energy
	Infrastruktur kesehatan dan sanitasi
	Infrastruktur komunikasi dan informasi

Sumber: Kementerian PPN dan BAPPENAS

a. Transportasi

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan kedudukan yang sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat dan kelangsungan pembangunan. Seringkali dikatakan bahwa transportasi merupakan urat nadi perekonomian dan sebagai penunjang pembangunan, maka dari itu penyempuranaan jasa transportasi adalah mutlak dilaksanakan bukan hanya ditinjau secara sektoral akan tetapi jasa transportasi yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk melayanai kegiatan transportasi.

> “Hubungan transportasi dan pembangunan menurut (Adisasmita, 2013:7) adalah merupakan proses interaksi dua arah yang esensial, dan akibat dari interaksi tersebut tergantung dari tipe perekonomian, selain dari pada itu tergantung pula dari tingkat pembangunan yang terjadi di suatu daerah atau negara”

Transportasi untuk pembangunan memiliki beberapa indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6 Variabel Transportasi

Dimensi	Variabel
Aksesibilitas/transportasi	Sarana transportasi
	Aksesibilitas transportasi

Sumber: Kementerian PPN dan BAPPENAS

b. Pelayanan publik

Menurut Roth (dalam Istianto, 2011:106) pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan jika untuk kepentingan publik disediakan oleh pemerintah contohnya *museum* atau pribadi yang menyediakan swasta contoh *restaurant.* Pelayanan publik memiliki prinsip-prinsip yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, dan tepat waktu. Konsepsi pelayanan publik pada dasarnya merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Selain prinsip-prinsip pelayanan publik dalam hal pembangunan memiliki variabel karena dalam konteks ini kegiatan pelayanan publik merupakan perwujudan dan penjabaran dari tugas dan fungsi aparatur pemerintah dalam rangka penyelenggraaan tugas umum pemerintahan maupun

pembangunan, variabel pelayanan publik pada pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7 Variabel Pelayanan Publik

Dimensi	Variabel
Pelayanan Publik	Pelayanan publik - Ketepatan - Kecepatan - kemudahan

Sumber: Kementerian PPN dan BAPPENAS

c. Penyelenggaraan pemerintahan

Orientasi penyelenggaraan pemerintah selalu tertuju kepada pembangunan, hingga pertimbangan pemberian otonomi pun perlu disesuaikan dengan potensi daerahnya agar mampu selain menyelenggarakan urusan-urusannya juga mampu membangun. Menurut Ndraha (dalam Makmur, 2008:6) Berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif sangat ditentukan oleh penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif karena di level pemerintahan inilah pelaksanaan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan pemerintahan daerah yang nyata dan faktual dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten dan kecamatan.

Tabel 8 Variabel penyelenggaraan pemerintahan

Dimensi	Variabel
Penyelenggaraan pemerintahan	Kemandirian
	Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber: Kementerian PPN dan BAPPENAS

C. Pelayanan Dasar

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 disebutkan bahwa pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar masuk ke dalam urusan pemerintah, urusan pemerintah ada tiga yang pertama urusan pemerintah absolut, konkuren dan umum. Dari ketiga urusan pemerintah tersebut urusan pemerintah konkuren dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan, pelayanan dasar merupakan bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib, menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 12 yang berkaitan dengan pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. pekerjaan umum dan penataan ruang
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat
6. sosial

Tetapi berdasarkan sumber dokumen dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk variabel pelayanan dasar desa hanya pendidikan dan kesehatan.

1. Pelayanan Pendidikan

Salah satu variabel pelayanan dasar adalah pendidikan, menurut Magta (dalam *Jurnal Pendidikan,* 2013) Pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus dan tak terputus dari generasi ke genarasi

di manapun di dunia ini. Pada dasarnya pengertian pendidikan (Undang-Undang SISDIKNAS No.20 tahun 2003) adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Menurut kamus Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, berdasarkan sumber dokumen dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam pembangunan akses pendidikan yang dibutuhkan adalah ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti:

a. TK (Taman Kanak-kanak)
b. SD (Sekolah Dasar)
c. SMP (Sekolah Menengah Pertama)
d. SMA (Sekolah Menengah Atas)

Standar pendidikan menurut Bulkin dkk (2015:8) untuk indikator pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, dengan standar yang paling baik adalah kode nomer 5 dan dijelaskan di bawah ini:

1. Ketersediaan dan akses TK

   Kode 0 (nol) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 20 km. Kode 1 (satu) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 10 km dan kurang dari 20 km. Kode 2 (dua) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat TK/RA/BA. Jarak menuju TK/RA/BA kurang dari 10 km. Kode 3 (tiga) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk desa kurang dari 0.00047665382434 (5 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 4 (empat) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0.00047665382434 (5 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0.00095330764868 (10 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 5 (lima) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat TK/RA/BA dengan rasio ketersediaan TK/RA/BA terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0.00095330764868 (10 fasilitas per 10.000 penduduk).

2. Ketersediaan dan Akses Ke SD Sederajat

   Kode 0 (nol) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 8 km. Kode 1 (satu) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 4 km dan kurang dari 8 km. Kode 2 (dua) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SD sederajat. Jarak menuju SD sederajat kurang dari 4 km. Kode 3 (tiga) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SD sederajat dengan rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0.00069840871109(7 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 4 (empat) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SD sederajat dengan rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00069840871109 (7 fasilitas per 10.000 penduduk) dan kurang dari 0,00139681742219 (14 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 5 (lima) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SD sederajat dengan rasio ketersediaan SD sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00139681742219 (14 fasilitas per 10.000 penduduk).

3. Ketersediaan dan Akses Ke SMP Sederajat

   Kode 0 (nol) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 9 km. Kode 1 (satu) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 6 km dan kurang dari 9 km. Kode 2 (dua) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat lebih dari atau sama dengan 3 km dan kurang dari 6 km. Kode 3 (tiga) merupakan kondisi dimana di desa tersebut tidak terdapat SMP sederajat. Jarak menuju SMP sederajat terdekat kurang dari 3 km. Kode 4 (empat) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMP sederajat dengan rasio ketersediaan SMP sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0,00053531809209 (5 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 5 (lima) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMP sederajat dengan rasio ketersediaan SMP sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00053531809209 (5 fasilitas per 10.000 penduduk).

4. Ketersediaan dan Akses Ke SMA Sederajat

   Kode 0 (nol) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 14 km. Kode 1 (satu) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 9 km dan kurang dari 14 km. Kode 2 (dua) merupakan kondisi dimana desa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat lebih dari atau sama dengan 5 km dan kurang dari 9 km. Kode 3 (tiga) merupakan kondisi dimana didesa tersebut tidak terdapat SMA sederajat. Jarak menuju SMA sederajat terdekat kurang dari 5 km. Kode 4 (empat) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMA sederajat dengan rasio ketersediaan SMA sederajat terhadap penduduk desa kurang dari 0,00044061849597 (4 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 5 (lima) merupakan kondisi dimana di desa tersebut terdapat SMA sederajat dengan rasio ketersediaan SMA sederajat terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00044061849597 (4 fasilitas per 10.000 penduduk).

2. Pelayanan Kesehatan

Kesehatan menurut Smet (dalam Maulana, 2009:4) Apapun yang harus mengandung paling tidak komponen, biomedis, personal dan sosiokultural. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan didefinisikan secara lebih kompleks sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Tidak hanya terbebas dari gangguan secara fisik, mental dan sosial tetapi kesehatan dipandang sebagai alat atau sarana untuk hidup secara produktif.

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam pembangunan akses kesehatan yang dibutuhkan adalah ketersediaan dan akses terhadap fasilitas kesehatan seperti:

a. Rumah sakit
b. Rumah sakit bersalin
c. Puskesmas/pustu (puskesmas pembantu)
d. Tempat praktek dokter
e. Poliklinik/balai pengobatan
f. Tempat praktek bidan
g. Poskesdes
h. Polindes
i. Apotek

Standar kesehatan menurut Bulkin dkk (2015:10) untuk indikator pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, dengan standar yang paling baik adalah kode nomer 5 dan dijelaskan di bawah ini:

1. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Rumah Sakit

   Kode 0 (nol) merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 23 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 1 (satu) merupakan kondisi desa yang tidak terdapat rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit terdekat sejauh lebih dari atau sama dengan 23 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dianggap mudah atau sangat mudah. Kode 2 (dua) merupakan kondisi desa yang tidak terdapat rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit terdekat kurang dari 23 km dan untuk mencapai dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 3 (tiga) merupakan kondisi desa yang tidak terdapat rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit terdekat kurang dari 23 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dianggap mudah atau sangat mudah. Kode 4 (empat) merupakan desa yang terdapat rumah sakit dengan rasio ketersediaan rumah sakit terhadap penduduk desa kurang dari 0,00018983029742 (2 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 5 (lima) merupakan desa yang terdapat rumah sakit dengan rasio ketersediaan rumah sakit terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00018983029742 (2 fasilitas per 10.000 penduduk).

2. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke RS Bersalin

   Kode 0 (nol) merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit bersalin terdekat lebih dari atau sama dengan 44 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 1 (satu) merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit bersalin terdekat lebih dari atau sama dengan 44 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 2 (dua) merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit bersalin terdekat kurang dari 44 km, dan untuk mencapai dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 3 (tiga) merupakan desa yang tidak terdapat rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Jarak menuju rumah sakit bersalin terdekat kurang dari 44 km, dan untuk mencapai dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 4 (empat) merupakan desa yang terdapat

rumah sakit bersalin dengan rasio ketersediaan rumah sakit bersalin terhadap penduduk desa kurang dari 0,00017982346108 (2 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 5 (lima) merupakan desa yang terdapat rumah sakit bersalin dengan rasio ketersediaan rumah sakit bersalin terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00017982346108 (2 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit.

3. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Puskesmas

Kode 0 (nol) merupakan desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat lebih dari atau sama dengan 4 km dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 1 (satu) merupakan desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat lebih dari sama dengan 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 2 (dua) merupakan desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat kurang dari 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 3 (tiga) merupakan desa yang tidak terdapat puskesmas/pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju puskesmas/pustu terdekat kurang dari 4 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 4 (empat) merupakan desa yang terdapat puskesmas/pustu dengan rasio ketersediaan puskesmas/pustu terhadap penduduk desa kurang dari 0,00062957239928 (6 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit bersalin, tetapi tidak ada rumah sakit. Kode 5 (lima) merupakan desa yang terdapat puskesmas/pustu dengan rasio ketersediaan puskesmas/pustu terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00062957239928 (6 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit tanpa memperhatikan ketersediaan rumah sakit bersalin.

4. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poliklinik/Balai Pengobatan

Kode 0 (nol) merupakan desa yang tidak terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah

sakit. Jarak menuju poliklinik/balai pengobatan terdekat lebih dari atau sama dengan 19 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit.Kode 1 (satu) merupakan desa yang tidak terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poliklinik/balai pengobatan terdekat lebih dari atau sama dengan 19 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut diirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 2 (dua) merupakan desa yang tidak terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menujuNpoliklinik/balai pengobatan terdekat kurang dari 19 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 3 (tiga) merupakan desa yang tidak terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu,rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poliklinik/balaiMpengobatan terdekat kurang dari 19 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 4 (empat) merupakan desa yang terdapat poliklinik/balai pengobatan dengan rasio ketersediaan poliklinik/balai pengobatan terhadap penduduk desa kurang dari 0,00028457719787 (3 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat puskesmas/pustu, tetapi tidak ada rumah sakit bersalin maupun rumah sakit. Kode 5 (lima) merupakan desa yang terdapat poliklinik/balai pengobatan dengan rasio ketersediaan poliklinik/balai pengobatan terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00028457719787 (3 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat rumah sakit bersalin atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan puskesmas/pustu.

5. Akses dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Dokter

Kode 0 (nol) merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek dokter terdekat lebih dari atau sama dengan 14 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 1 (satu) merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek dokter terdekat lebih dari atau sama dengan 14 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 2 (dua) merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek dokter terdekat terdekat kurang dari 14 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut

dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 3 (tiga) merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek dokter terdekat kurang dari 14 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 4 (empat) merupakan desa yang terdapat tempat praktek dokter dengan rasio ketersediaan tempat praktek dokter terhadap penduduk desa kurang dari 0,0003571413567 (4 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat poliklinik/balai pengobatan, tetapi tidak ada puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Kode 5 (lima) merupakan desa yang terdapat tempat praktek dokter dengan rasio ketersediaan tempat praktek dokter terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,0003571413567 (4 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan poliklinik/balai pengobatan.

6. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Tempat Praktek Bidan

Kode 0 (nol) merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat lebih dari atau sama dengan 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 1 (satu) merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat lebih dari atau sama dengan 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 2 (dua) merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat kurang dari 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 3 (tiga) merupakan desa yang tidak terdapat tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju tempat praktek bidan terdekat kurang dari 16 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 4 (empat) merupakan desa yang terdapat tempat praktek bidan dengan rasio ketersediaan tempat praktek bidan terhadap penduduk desa kurang dari 0,00050732962398 (5 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk

jika di desa tersebut terdapat tempat praktek dokter, tetapi tidak tersedia poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Kode 5 (lima) merupakan desa yang terdapat tempat praktek bidan dengan rasio ketersediaan tempat praktek bidan terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00050732962398 (5 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan tempat praktek dokter.

7. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Poskesdes Atau Polindes

Kode 0 (nol) merupakan desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat lebih dari atau sama dengan 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 1 (satu) merupakan desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat lebih dari atau sama dengan 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 2 (dua) merupakan desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat kurangdari 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 3 (tiga) merupakan desa yang tidak terdapat poskesdes, polindes, tempat praktek bidan, tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit. Jarak menuju poskesdes atau polindes terdekat kurangdari 8 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 4 (empat) merupakan desa yang terdapat poskesdes atau polindes dengan rasio ketersediaan poskesdes atau polindes terhadap penduduk desa kurang dari 0,00070719038224 (7 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat tempat praktek bidan, tetapi tidak tersedia tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, maupun rumah sakit Kode 5 (lima) merupakan desa yang terdapat poskesdes atau polindes dengan rasio ketersediaan poskesdes atau polindes terhadap

penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00070719038224 (7 fasilitas per 10.000 penduduk). Termasuk jika di desa tersebut terdapat tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, puskesmas, pustu, rumah sakit bersalin, atau rumah sakit, tanpa mempertimbangkan ketersediaan tempat praktek bidan.

8. Ketersediaan dan Kemudahan Akses Ke Apotek

   Kode 0 (nol) merupakan desa yang tidak terdapat apotek. Jarak menuju apotek terdekat lebih dari atau sama dengan 17 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 1 (satu) merupakan desa yang tidak terdapat apotek. Jarak menuju apotek terdekat lebih dari atau sama dengan 17 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 2 (dua) merupakan desa yang tidak terdapat apotek. Jarak menuju apotek terdekat kurang dari 17 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan sulit atau sangat sulit. Kode 3 (tiga) merupakan desa yang tidak terdapat apotek. Jarak menuju apotek terdekat kurang dari 17 km, dan untuk mencapai fasilitas tersebut dirasakan mudah atau sangat mudah. Kode 4 (empat) merupakan desa yang terdapat apotek dengan rasio ketersediaan apotek terhadap penduduk desa kurang dari 0,00032420638537 (3 fasilitas per 10.000 penduduk). Kode 5 (lima) merupakan desa yang terdapat apotek dengan rasio ketersediaan apotek terhadap penduduk desa lebih dari atau sama dengan 0,00032420638537 (3 fasilitas per 10. penduduk).

D. Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melihat kedua pengertian antara pembangunan dan desa, maka penulis menyimpulkan bahwa pembangunan desa adalah usaha atau proses perubahan demi tercapainya tingkat kesejahteraan dan mutu hidup suatu masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat.

1. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia seta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menurut Bulkin dkk (2015:6) lima dimensi indeks pembangunan desa yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan

a. Pelayanan Dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan.
b. Kondisi Infrastruktur mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana;Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek
c. Aksesibilitas/transportasi, variabel-variabel penyusunnya mencakup ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti kelompok pertokoan, minimarket, maupun toko kelontong, pasar, restoran, rumah makan,maupun warung/kedai makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank;
d. Pelayanan Umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya.
e. Penyelenggaraan Pemerintahan mewakili indikasi kinerja pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi wargayang dalam hal ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa.

2. Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa

Kegiatan pembanguna desa dapat dilakukan keseluruh penjuru daerah tidak terkecuali dengan desa, pembangunan desa seharusnya dilaksanakan dengan memegang prinsip-prinsip pembangunan desa, menurut (Adisasmita, 2006:19) prinsip pembangunan pedesaan yaitu:

a. Transparansi
   Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
b. Partisipatif
   Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.
c. Dapat dinikmati masyarakat
d. Akuntabilitas
   Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
e. Berkelanjutan

Selain memiliki prinsip pembangunan, pada pembangunan desa memiliki tujuan dan sasaran sebagai tumpuan atau bidikan saat melaksanakan pembangunan. Menurut (Adisasmita, 2006: 18) tujuan pembangunan ada dua yaitu pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek. Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Selain tujuan diperlukan sasaran pembangunan, sasaran pembangunan menurut (Adisasmita, 2006:18) :

a. Peningkatan produksi dan produktivitas
b. Percepatan pertumbuhan desa
c. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
d. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
e. Perkuatan kelembagaa.

Pembangunan desa pasti memiliki berbagai masalah, analisis masalah membahas berbagai persoalan pembangunan daeah paling sedikit meliputi lima persoalan pokok menurut (Mardikanto dan Prabowo, 2013:3-84) yaitu:

a. Persoalan terkait dengan peningkatan produksi sektor pedesaan (pertanian dan industri).
b. Persoalan lingkungan hidup
c. Persoalan sektor pendidikan dan kesehatan
d. Persoalan infrastruktur dan prasarana
e. Persoalan kelembagaan di dalam masayarakat pedesaan.

E. Desa Maju dan Tertinggal

Desa maju dapat menjadi salah satu pendukung kesejahteraan rakyat dalam segi apapun terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dijelaskan bahwa desa maju merupakan desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menaggulangi

kemiskinan. Menurut Bulkin dkk (2015:30) Desa maju/mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap peleyanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. secara teknis desa ini memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.

Menurut Bulkin dkk (2015:30) Desa tertinggal yaitu desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis desa tertinggal merupakan desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) kurang dari atau sama dengan 50.

Nilai indeks pembangunan desa diperoleh dari penjumlahan secara tertimbang terhadap setiap indikator penyusun indeks pembangunan desa. Nilai yang dijumlahkan adalah skor setiap indikator yang sudah ditimbang/dikalikan dengan penimbang masing-masing indikator. Perhitungan indeks pembangunan desa diformulasikan sebagai berikut:

$IPD\ (b_1 * V_1 + b_2 * V_2 + b_3 * V_3 + ... + b_{42} * V_{42}) * 20$

Keterangan :

IPD : nilai IPD setiap desa (bernilai 0-100)
V_1 : skor indikator ke 1 1
V_2 : skor indikator ke 2
V_3 : skor indikator ke 3
V_{42} : skor indikator ke 42

b_1 : penimbang/pembobot indikator ke 1
b_2 : penimbang/pembobot indikator ke 2
b_3 : penimbang/pembobot indikator ke 3
b_{42} : penimbang/pembobot indikator ke 42

Menurut Soetomo (dalam jurnal *penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial,2011)* menjelaskan, kawasan tertinggal adalah suatu wilayah yang cukup lama dikembangkan bersama-sama dengan wilayah yang lain tetapi karena berbagai sebab kawasan tersebut tetap belum dapat berkembang seperti yang diharapkan, sehingga kehidupan sosial ekonomi penduduknya tetap rendah. Salah satu penyebab utama karena terbatasnya potensi dan sumber daya yang dimiliki. Desa merupakan bagian dari wilayah sehingga dapat disimpulkan bahwa desa tertinggal merupakan desa yang dikembangkan bersama dengan desa lain tetapi karena berbagai sebab maka belum berkembang

Terkait itu, menurut pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam (Jurnal *Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial,2011)* suatu daerah dikategorikan tertinggal disebabkan beberapa faktor, faktor ketertinggalan suatu daerah ini dapat dikaitkan dengan faktor ketertinggalan suatu desa, karena ketertinggalan daerah bermula dari banyaknya ketertinggalan desa di daerah tersebut karena:

1. secara geografis, relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh dipedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan,pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karenafaktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupunmedia komunikasi.
2. Dari sisi sumber dayaalam, tidak memiliki potensi, atau memiliki sumber daya alam besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat ekploitasi sumber daya alam yang berlebihan
3. Sumber daya manusia, umumnya masyarakat di daerah tertinggal, tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang
4. Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi,transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan,pendidikan, dan pelayanan la innya yang menyebabkan kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial

5. Seringnya (suatu daerah) mengalami bencana alam dan konflik sosial yang berakibat terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi
6. Suatu daerah menjadi tertinggal, disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat,seperti: kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

F. Teori Struktural Fungsional

Teori ini memiliki dalil bahwa segala sesuatu yang berfungsi akan eksis dengan sendirinya dan segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya, teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur sistem, setiap unsur saling berhubungan secara fungsional satu dengan lainnya, sehingga rusaknya salah satu unsur sistem akan menyebabkan jalannya sistem secara keseluruhan menjadi terganggu dan menurut Soersono (2008:14) tiap unsur sistem memberikan sumbangan bagi terjadinya keseimbangan.

Pendapat Soersono tersebut menjadi salah satu alasan penulis menggunakan teori struktural fungsional, karena menggunakan teori ini dapat terjadi keseimbangan sehingga dapat terjawab mengapa terjadi ketimpangan pembangunan di Desa Atar Kuwau tersebut. Teori struktur fungsional dari Persons (dalam Mardikanto & Prabowo, 2013:9) yang mengemukakan bahwa pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial yang terjadi dalam:

1. Adaptasi terhadap kebutuhan situasional
2. Pencapaian tujuan-tujuan
3. Integrasi atau pengaturan tata hubungan
4. Pola pemeliharaan atau pengurangan ketegangan dari pola budaya tertentu.

Perhatian utama Parsons lebih tertuju kepada sistem sebagai satu kesatuan ketimbang pada aktor di dalam sistem, Menurut Rocher (dalam Ritzer dan Goodman, 2005:127) menyatakan bahwa kolektivitas yang relatif mencukupi kebutuhan sendiri, anggotanay mampu memenuhi seluruh kebutuhan kolektif dan individualnya dan hidup sepenuhnya dalam kerankanya sendiri.

Tabel 8 Masyarakat, subsistemnya dan imperatif fungsionalnya

SISTEM FIDUCIARI	KOMUNITAS KEMASYARAKATAN
SISTEM EKONOMI	SISTEM PEMERINTAHAN

Sumber: Ritzer dan Goodman 2005

Berdasarkan tabel di atas menurut Ritzer dan Goodman(2005:127) dapat dijelaskan bahwa:

1. Adaptasi mencakup
   a. Pekerjaan
   b. Ekonomi masyarakat
   c. Produksi
   d. Alokasi
   e. Kebutuhan masyarakat

2. Tujuan mencakup
   a. Mobilisasi aktor dan sumber daya

3. integrasi mencakup:
   a. Koordinasi

4. Sistem *fiduciary* sebagai pelaksana pemeliharaan pola
   a. Nilai dan norma

Teori struktural fungsional Talcot Parsons dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem ”tindakan” yang disebut dengan skema AGIL.

Melalui AGIL ini kemudian dikembangkan pemikiran mengenai struktur dan sistem. Menurut Parson fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Menurut Parson (dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 2014) agar dapat bertahan sebuah sistem harus terdiri dari 4 fungsi yaitu :

1. Adaptation (adaptasi).
   Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Berdasarkan pengertian tentang adaptasi maka dapat disimpulkan indikator adaptasi:
   a. Tenaga kerja
   b. Ekonomi masyarakat
   c. Produksi
   d. Alokasi
   e. Kebutuhan masyarakat

2. Goal attainment (pencapaian tujuan).
   Sebuah sistem mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Menurut (Adisasmita, 2006: 18) tujuang pembangunan ada dua yaitu pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek. Dalam penelitian ini karena peneliti hanya menggunakan sedikit waktu maka tujuan pembangunan yang di pakai adalah tujuan pembangunan jangka pendek, yang meliputi:
   a. Mobilisasi aktor dan sumber daya

3. Integration(integrasi).
   Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L). Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya supaya dia bisa berfungsi secara maksimal. Komponennya jika diterjemahkan dari pengertian integrasi adalah:
   a. Koordinasi

4. Latency(pemeliharaan pola)
   Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi . Berdasarkan terjemahan pada pemeliharaan pola, indikator yang di dapat adalah:
   a. Nilai dan norma
      Dalam membantu proses pembangunan maka perangkat desa bersama dengan masyarakat harus tetap menjaga nilai dan norma yang ada

dalam masyarakat agar dapat saling menghormati sehingga tercipta motivasi pembangunan.

G. Kerangka pikir

Desa Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis adalah desa tertinggal di Kabupaten Lampung Barat, desa tertinggal berbeda dari desa maju terlihat dari segi standar pelayanan minimal desa, jika standap pelayanan desa telah terpenuhi seluruhnya maka desa tersebut merupakan desa yang maju sedangkan jika desa tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimum desa maka desa tersebut tergolong tertinggal setelah ditemukan masalah yang paling berpengaruh terhadap pembangunan desa dan apa saja yang menyebabkan pembangunan nya rendah terutama pada pelayanan dasar lalu desa tertinggal diteliti dengan teori struktural fungsional menurut Talcot Parsons agar di peroleh kebijakan yang tepat untuk pembangunan desa dibantu dengan adanya potensi desa yang ada untuk memudahkan pembangunan desa.

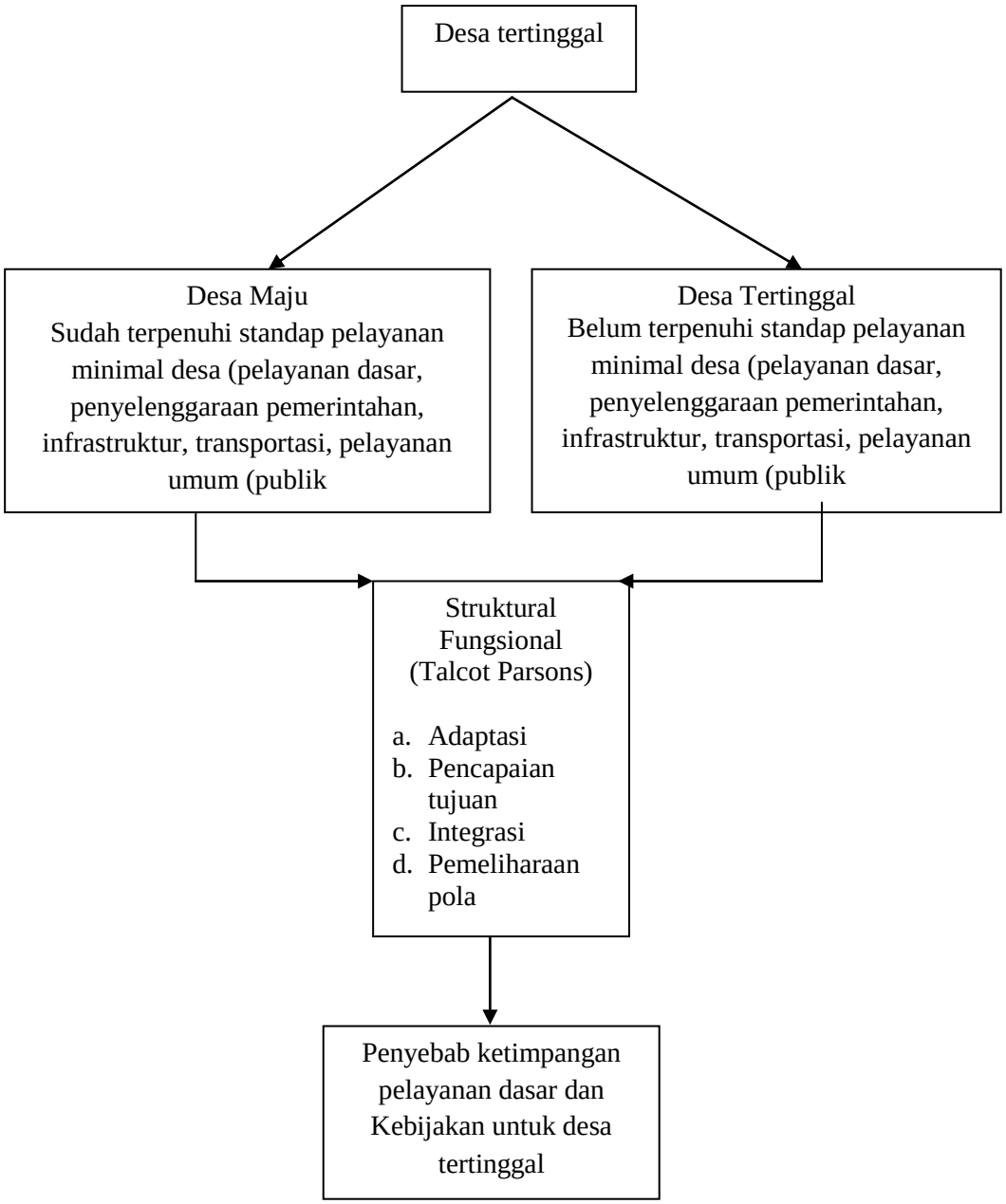

Gambar 1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Peneliti

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian

Pada sebuah penelitian, untuk mengungkap dan memahami apa yang terletak dibalik fenomena dapat digunakan tipe penelitian, pada penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat pada penelitian ini subjek yang akan diteliti adalah perangkat desa sedangkan objeknya yaitu pembangunan desa tertinggal.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor (dalam Sujarweni,2014:30) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskrptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pada penelitian ini yang menjadi dasar pertimbangan penggunaan tipe penelitian deskriptif karena penulis ingin memperoleh, memahami dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembangunan desa tertinggal di Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat yang dibandingkan dengan Pekon Argomulyo Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat dan lebih merujuk

kepada pelayanan dasar sehingga terungkap mengapa terjadi ketimpangan pada pembangunan desa dan apa kebijakan yang tepat untuk desa tertinggal.

Dalam membangun desa tertinggal yang merupakan desa tertinggal di Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, untuk meneliti sebuah kebijakan yang tepat digunakan penelitian kualitatif karena penemuan kebijakan pembangunan desa tertinggal tidak memiliki pedoman yang tegas atau prosedur yang spesifik dan pasti karena dalam pembangunan desa tentunya dilakukan dengan cara dan perilaku yang berbeda pada tiap-tiap desa dan di anggap perlu diteliti

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting keberadaannya untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian, seperti yang dikemukakan oleh (Idrus 2009: 24), fokus penelitan adalah batas kajian penelitian yang ditentukan, maksudnya penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian seseorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.

Penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dicari datanya ataupun mana yang akan dibuang. Mengingat pentingnya fokus penelitian untuk membuat penelitian lebih terarah dan efesien, maka penulis merumuskan fokus penelitian ini pelaksanaan

wewenang di bidang pembangunan desa sehingga diketahui penyebab ketimpangan pembangunan yang dapat dilihat melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan desa tertinggal di bidang pelayanan dasar dengan teori struktural fungsional Talcot Parsons

   a. Adaptasi mencakup
      1. Pekerjaan
      2. Ekonomi masyarakat
      3. Produksi
      4. Alokasi
      5. Kebutuhan masyarakat

   b. Tujuan mencakup:
      1. Mobilisasi aktor dan sumber daya

   c. integrasi mencakup:
      1. koordinasi

   d. Sistem *fiduciary* sebagai pelaksana pemeliharaan pola
      1. Nilai dan norma

C. Jenis Data

Peneliti harus mendapatkan data secara langsung dan akurat. Peneliti harus mencari data dari sumber utama *(first hand)*, dan bukan dari sumber kedua agar keabsahan data terjamin. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Menurut (Idrus, 2009: 86) data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan wawancara mendalam dengan tatap muka antara peneliti dengan informan, yang

merupakan Kepala Desa (Pekon) Atar Kuwau, Kepala Urusan Pemerintahan Pekon Atar Kuwau, masyarakat Pekon Atar Kuwau, Kepala Desa (Pekon) Argomulyo, Sekretaris Pekon Argomulyo dan masyarakat Pekon Argomulyo. Penggunaan wawancara pada data primer ini karena wawancara dapat digunakan untuk menggali informasi secara langsung tentang pelaksanaan pembangunan desa dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut merupakan wewenang pemerintah desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder (Idrus, 2009: 86) adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Dalam penelitian ini perolehan data sekunder didapat dari dokumen yang dimiliki oleh kepala desa dan perangkat Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo yang berasal dari profil desa (Pekon) dan Rencana Kerja Pemerintah Pekon (RKP) tentang data pendukung bahwa mereka melaksanankan pembangunan desa dengan baik dan sesuai prinsip pembangunan dan bagaimana pelaksanaan pembangunan desa tersebut. Dokumen digunakan sebagai data sekunder karena dokumen merupakan data pendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, dengan dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bukti dari data primer.

D. Penentuan Informan

Informan menurut Prastowo (2010:147) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Pada sebuah penelitian, penentuan informan sangat penting

dilakukan agar peneliti dapat menentukan informan yang tepat untuk mendapatkan data lapangan yang akan dijadikan pendukung penelitian. Nasution (dalam Prastowo, 2016: 44) mengungkapkan bahwa metode kualitatif tidak menggunakan *random sampling* atau acak dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. Sampelnya biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan *(purpose)* penelitian. Menurut Maxwell (dalam Alwasilah, 2011:103) terdapat empat tujuan digunakannya sampel purposif:

1. Mencapai keterwakilan *(representativeness)* dari setting, individu-individu dan aktivitas-aktivitas yang dipilih.
2. Menggabarkan secara memadai heterogenitas populasi.
3. Memilih sampel secara sengaja untuk menguji kasus-kasus yang kritis terhadap teori yang dijadikan acuan studi.
4. Membangun perbandingan-perbandingan untuk menggambarkan alasan atas perbedaan yang terjadi antara setting dan individu.

Sesuai dengan tujuan pengambilan sampel purposif tersebut yaitu telah mencapai keterwakilan dengan memilih enam informan tersebut, heterogenitas dalam penentuan informan tersebut dipilih informan dari penilaian sudut pandang yang berbeda misal antara pemerintah desa dengan masyarakat, memilih sampel sesuai kasus maka pemerintah desa dan masyarakat sangat tepat dijadikan informan serta membangunan perbandingan. maka Informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 10 Data Informan

NO	Nama	Jabatan	Waktu Wawancara
1.	Tri Ariyogi	Kepala Desa (Pekon) Atar Kuwau	18 Januari 2018, Pukul 08:11 WIB
2.	Rohidi	Kepala Urusan Pemerintahan Pekon Atar Kuwau	5 Januari 2018, Pukul 09:43 WIB
3.	Buksir	Masyarakat Pekon Atar Kuwau	18 Januari 2018, Pukul 08:25 WIB
4.	Abdul Harjan	Kepala Desa (Pekon) Argomulyo	5 Januari 2018, Pukul 14:02 WIB
5.	Dadang s	Sekretaris Pekon Argomulyo	11 Januari 2018, Pukul 15:53 WIB
6.	Jumadi	Masyarakat Pekon Argomulyo	17 Januari 2018, Pukul 12:18 WIB

Sumber: Diolah Peneliti

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama menurut (Sugiyono dalam Fuad dkk, 2013:10) adalah observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan antara ketiganya atau triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara kualitatif rata-rata satu setengah jam hingga dua jam lamanya, memungkinkan interaksi yang diperpanjang dengan responden. Kerangka waktu ini memungkinkan pewawancara yang kompeten untuk membuat hubungan dengan responden dan untuk membentuk suatu iklim kepercayaan. Menurut Haden (dalam Emzir, 2010:50) wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang

dalam situasi saling berhadapan, satu orang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti tentang pendapat dan keyakinannya.

(Maykut 1994:79) mengemukakan bahwa dalam kajian-kajian kualitatif, wawancara sering berperan sewaktu seseorang berperan sebagai pengamat partisipan, meskipun orang-orang ditempat latar mungkin tidak menyadari bahwa percakapan informal mereka adalah wawancara. Di lapangan, kadang-kadang mengatur wawancara dengan orang-orang yang menurut keyakinan peneliti bisa menambah pemahamannya tentang fenomena yang dikaji. Para partisipan setuju untuk diwawancarai untuk membantu peneliti mendapatkan fokus penelitian dan dengan metode wawancara dapat diharapkan langsung mendapat informasi dan data yang akurat dari pelaksana pembangunan Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo yang dilakukan berkala selama tiga minggu kepada informan khususnya pemerintah desa (pekon).

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian. Tujuan observasi dalam (Patton, 1980:124) adalah untuk mendeskripsikan latar belakang yang diobservasi; kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu; orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan; makna latar; kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya. Dalam penelitian ini

observasi dilakukan dengan pengamatan objek penelitian yaitu balai Pekon sementara Pekon Atar Kuwau dan balai Pekon Argomulyo serta dilakukan pencatatan tentang hasil pengamatan dan gejala dan gambaran yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Pengertian dokumen menurut (Bogden & Biklen, 1998:5) adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasusu yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. Ada beberapa jenis dokumen yang dapat dipertimbangkan yaitu monografi Pekon Atar Kuwau, Rencana Kerja Pemerintah Pekon Atar kuwau, monografi Pekon Argomulyo, dan Rencana Kerja Pemerintah Pekon Argomulyo.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data yang didapat di lapangan atau hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang telah dihasilkan dari lapangan maka langkah selanjutnya menurut (Nugroho, 2016:42) yaitu:

1. Editing, yaitu data yang diperoleh dengan cara pemilahan data dengan cermat dan selektif sehingga diperoleh data yang relefan dengan pokok masalah serta lebih rinci.
2. Evaluasi, yaitu penentuan nilai terhadap data-data yang telah terkumpul.
3. Klasifikasi, yaitu penyusunan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis data.
4. Sistematika Data, yaitu proses penyusunan data menurut sistem yang telah ditetapkan.
5. Penyusunan Data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang didapatkan di lapangan diolah seperti yang telah di jelaskan di atas maka proses selanjutnya adalah menganalisis data, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian, dengan induktif dan mencari pola, model, serta teori. Seperti pendapat (Fuad dan Nugroho 2014: 16) data-data dianalisis dimana prosesnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari *field notes* (catatan lapangan). Reduksi data perlu dilakukan karena peneliti semakin lama dikancah penelitian akan semakin banyak data atau *field not (*catatan lapangan) yang peneliti kumpulkan. Tahap dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola yang mengacu pada pelaksanaan pembangunan Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Display data

dapat membantu peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan analisis selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami sebelumnya. Pada penelitian ini penyajian data adalah dengan teks naratif yang mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data menurut (Miles dan Humberman dalam Fuad dan Nugroho, 2014: 17) adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan pola-pola sudah tergambarkan dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, peneliti kemudian mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang fenomena yang kita teliti dan kemudian dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru, maka penelitian dalam penelitian ini peneliti mengambil intisari dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

H. Teknik Validasi Data

Setelah seluruh proses penelitian dilakukan, data sudah diperoleh, sudah diolah serta sudah disusun dengan benar maka selanjutnya melakukan teknik validasi data. Teknik validasi adalah teknik keabsahan atau kebenaran sebuah data yang telah didapatkan peneliti. Menurut (Tresiana 2013:142) untuk menjaga tingkat kesahihan penelitian maka diperlukan media handal yang bermanfaat untuk mengemiliminir derajad kesalahan dan perlunya tindakan

urgen peneliti untuk menghindari *validity threat* (bias/validitas semu/validitas palsu). Maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi.

Banyak cara untuk melakukan pengujian validitas data untuk mendapatkan data yang kredibel/shahih, seperti yang dilakukan (Lincoln dan Guba dalam Emzir, 2010: 79) mereka mengusulkan empat kriteria untuk menilai kualitas penelitian kualitatif dan secara eksplisit menawarkan sebagai alternatif dari kriteria yang lebih berorientasi kuantitatif tradisional antara lain

1. Kredibilitas

   Aktivitas yang dapat dilakukan untuk memperoleh kredibilitas dengan keterlibatan peneliti dalam kehidupan partisipan dan diskusi panel selain itu dapat dilakukan dengan cara observasi. Menurut Afiyanti (dalam *Jurnal Keprawatan Indonesia,* 2008) suatu hasil penelitian dikatakan memiliki kredibilitas yang tinggi terletak pada keberhasilan studi tersebut mencapai tujuannya, mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan *setting*, proses, kelompok sosial atau pola interaksi yang majemuk/kompleks. Kredibilitas cocok untuk penelitian kualitatif yang menggunakan data primer wawancara karena peneliti dapat berdiskusi dan terlibat dengan pihak yang diteliti.

2. Transferabilitas

   Transferbilitas dalam penelitian kualitatif menurut Steurubert & Carpenter (dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia,* 2008) sejauh mana temuan suatu peneliti yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diaplikasikan dengan kelompok lain. Hal ini hanya dapat dicapai apabila objek studi

dapat dilepas sepenuhnya dari pengaruh konteks penelitian dan itu merupakan suatu yang mustahil karena penelitian kualitatif tidak dapat dinilai sendiri oleh peneliti melainkan oleh para pembaca penelitian tersebut.

3. Dependebalitas

Penelitian kualitatif yang menggunakan dependabilitas untuk menilai keilmiahan suatu penelitian menurut Afiyanti (dalam *Jurnal Kesehatan Indonesia*. 2008) adalah sejauh mana temuan penelitian kualitatif memperlihatkan konsistensi hasil temuan ketika dilakukan oleh peneliti yang berbeda dengan waktu yang berbeda, tetapi dilakukan dengan metodologi dan *interview* yang sama. Tetapi pada penelitian kualitatif yang dilakukan pada ilmu sosial akan berubah sewaktu waktu berdasarkan apa yang diteliti dan waktu, meskipun penelitian sama jika waktu berbeda dikhawatirkan subjek dan objeknya sudah berbeda.

4. Konfirmabilitas .

Konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif menurut Afiyanti (dalam *Jurnal Kesehatan Indonesia,* 2008) yaitu kesediaan peneliti mengungkapkan secara terbuka tentang proses dan eleme-elemen penelitiannya sehingga peneliti lain melakukan penilaian tentang hasil-hasil temuannya. Tetapi menurut peneliti alur pikir setiap orang berbeda apabila dijelaskan secara terbuka oleh peneliti kepada pihak lain, pihak tersebut bisa saja berbeda sudut pandangnya.

Dari keempat cara tersebut peneliti memilih untuk menggunakan cara kredibilitas. Kredibilitas *(credibility).* Kriteria kredibilitas melibatkan penetapan hasil penelitian kualitatif adalah kredibel atau dapat dipercaya dari persepektif partisipan dalam penelitian tersebut. Karena persepektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendiskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *memberchecking.*

Fokus peneliti disini berfokus kepada model triangulasi. Menurut (Emzir, 2010: 82) triangulasi adalah proses penguatan bukti dari individu-individu yang berbeda (dari Kepala desa (Pekon) Atar Kuwau, Pemerintah desa, masyarakat dan Kepala desa (Pekon) Argomulyo, pemerintah desa dan masyarakat), jenis data (dokumen profil Pekon Atar Kuwau dan RKP dan Pekon Argomulyo dan RKP serta dari hasil observasi) dalam deskripsi tema-tema dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian maka teknik validasi data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah trianggulasi teknik pengumpulan data, untuk memudahkan peneliti karena teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, maka saat melakukan pengumpulan data secara otomatis penulis secara bersamaan melakukan validitas data yang peneliti peroleh.

IV. GAMBARAN UMUM

Analisis pelaksanaan pembangunan desa tertinggal (studi pada ketimpangan pembanguna di Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat) dapat dimulai dari pengenalan karakteristik dua pekon yaitu Atar Kuwau dan Argomulyo, Pekon Argomulyo merupakan pekon pembanding dari pekon Atar Kuwau Karena Indeks Pembangunan Desa (IPD) Pekon Argomulyo lebih besar dari Pekon Atar kuwau sehingga indeks pembangunan dasar pada Pekon Argomulyo tentunya lebih besar dari Pekon Atar Kuwau data yang akan dipaparkan penulis pada bab ini adalah data tentang kedua pekon terebut.

A. Gambaran Umum Pekon Atar Kuwau

Pekon Atar Kuwau merupakan salah satu pekon yang berada di Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, pekon ini merupakan pemekaran dari pekon Bedudu Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat, Pekon Atar Kuwau berdiri pada 16 November 2012 dengan jarak Pekon Atar Kuwau dengan Kecamatan Batu Ketulis adalah 15 Km, dengan jumlah penduduk 1234 orang atau 382 KK dan luas wilayah 920 ha. Pekon Atar Kuwau tidak memiliki sarana perekonomian sama sekali.

Pekon Atar Kuwau berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Pekon Sumber Rejo Kecamatan Batu Ketulis
2. Sebelah Selatan : Pekon Teba Liokh Kecamatan Batu Brak
3. Sebelah Timur : Pekon Atar Bawang Kecamatan Batu Ketulis

4. Sebelah Barat : Pekon Bedudu Kecamatan Belalau

Gambar Peta wilayah Pekon Atar Kuwau dapat dilihat pada gambar:

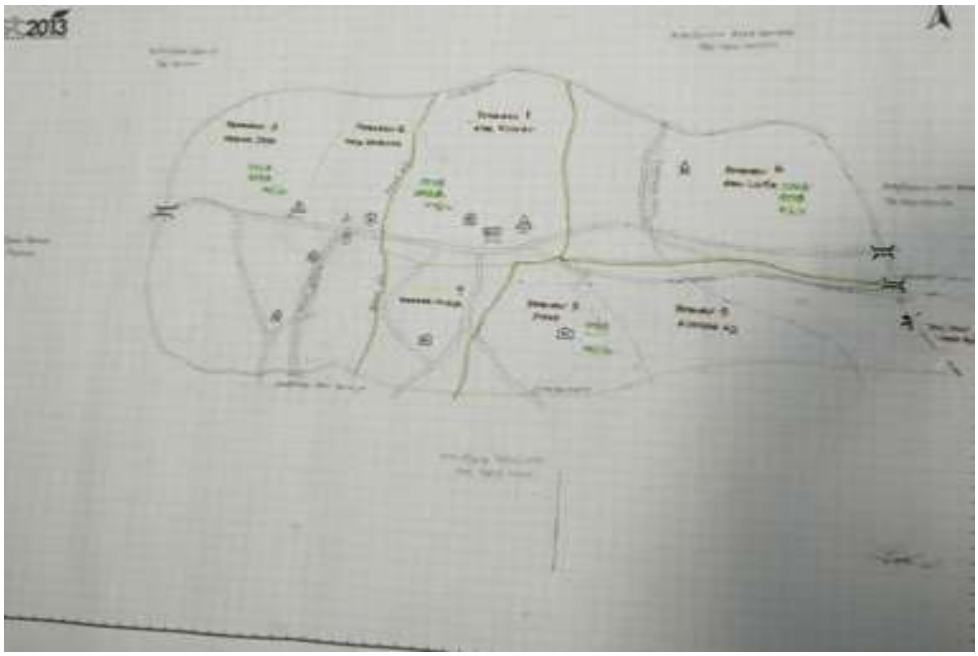

Gambar 2 Peta Pekon Atar Kuwau

Sumber : Dokumen pemerintah Pekon Atar Kuwau

Pekon Atar Kuwau memiliki 7 dusun atau disebut pemangku yaitu pemangku 1 Atar Kuwau, pemangku 2 Kayu Kehenak, pemangku 3 Gunung aji, pemangku 4 Karang mulya, pemangku 5 Pikah, pemangku 6 Atar lintiik, pemangku 7 Mekar jaya, jajaran pemerintah Pekon Atar Kuwau adalah:

1. Peratin : Tri Ariyogi
2. Juru tulis/ Sekretaris Pekon : Sahril
3. Bendahara : Atik Rahmawati
4. Kepala urusan Pemerintahan : Rohidi
5. Kepala urusan pembangunan : Hernawan

6. Kepala urusan umum : Dauri
7. Kepala seksi perencanaan : Dahmir
8. Kepala seksi pemberdayaan : Agus sugianto

1. Luas Tanah

Tabel 11 Luas Tanah Berdasarkan Sawah Dan Bukan Sawah

Tahun	Sawah	Bukan sawah	Jumlah
2016	25	914	939
2015	5	915	920

Sumber : BPS Lampung Barat

Luas tanah berdasarkan sawah dan bukan sawah pada Pekon Atar Kuwau Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016 luas tanah sawah bertambah dari tahun 2015 untuk sawah menjadi berjumlah 25 dari sebelumnya hanya berjumlah 5 dan yang bukan sawah berkurang dari tahun sebelumnya berjumlah 915 jadi hanya berjumlah 914.

2. Kesejahteraan Keluarga

Tabel 12 Kesejahteraan Keluarga Pekon Atar Kuwau

NO	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1.	keluarga Prasejahtera	100 keluarga
2.	Keluarga sejahtera 1	164 keluarga
3.	Keluarga sejahtera 2	11 keluarga
4.	Keluarga sejahtera 3	91 keluarga
5.	Keluarga sejahtera 3 plus	8 keluarga
	Total	374 keluarga

Sumber : Profil Pekon Atar Kuwau

Kesejahteraan keluarga pada Pekon Atar Kuwau paling banyak pada keluarga sejahtera 1 dan yang paling rendah adalah keluarga sejahtera 3 tetapi keluarga prasejahtera masih cukup tinggi untuk Pekon Atar Kuwau ini sehingga masih dikatakan banyak keluarga yang masih belum sejahtera.

3. Sarana Pendidikan

Kondisi sarana pendidikan pada Pekon Atar Kuwau ini belum memiliki Paud/Tk tetapi hanya memiliki Sekolah Dasar Swasta yang dikelola oleh yayasan bukan dari Pekon langsung sehingga untuk sarana pendidikan masih sangat kurang di Pekon Atar Kuwau, pemerintah pekon hanya memiliki data-data penduduk yang mengenyam pendidikan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 13 Data Penduduk Yang Berpendidikan Pekon Atar Kuwau

Pendidikan	Jumlah
1. Tidak Tamat SD/ Sederajat	40 orang
2. SD	341 orang
3. Tidak Lulus SMP	21 orang
4. SMP	97 orang
5. SMA	79 orang

Sumber : Monografi Pekon Atar Kuwau 2017

4. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan pada Pekon Atar Kuwau hanya memiliki satu puskesmas pembantu dan hanya terdapat satu bidan yang merupakan pegawai tidak tetap (PTT) yang melayani masyarakat Pekon Atar Kuwau tersebut dan diadakan posyandu setiap satu bulan sekali. Pendidikan dan kesehatan tentunya membutuhkan sosialisasi yang optimal untuk memberi informasi kepada masyarakat tetapi pada Pekon Atar Kuwau tidak pernah ada sosialisasi tentang pendidikan sedangkan untuk kesehatan terakhir sosialisasi di tingkat Sekolah Dasar pada bulan september 2017 yaitu sosialisasi pentingnya cuci tangan, tetapi untuk lebih lanjutnya tidak ada.

B. Gambaran Umum Pekon Argomulyo

Pekon Argomulyo merupakan salah satu pekon yang berada di Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, pekon ini merupakan pemekaran dari Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat, Pekon Argomulyo berdiri tahun 1986, jarak Pekon Argomulyo dengan Kecamatan Batu Ketulis adalah 16 Km dengan jumlah penduduk 1712 orang atau 540 KK dengan luas 958 ha. Pekon Argomulyo memiliki satu sarana perekonomian yaitu pasar desa.

Pekon Argomulyo berbatasan dengan:

1. Sebelah Timur : Pekon Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa
2. Sebelah Barat : Pekon Campang tiga Kecamatan Batu Ketulis

3. Sebelah Utara : Pekon Luas Kecamatan Batu Ketulis

4. Sebelah Selatan : Pekon Mekar Sari Kecamatan Pagar Dewa

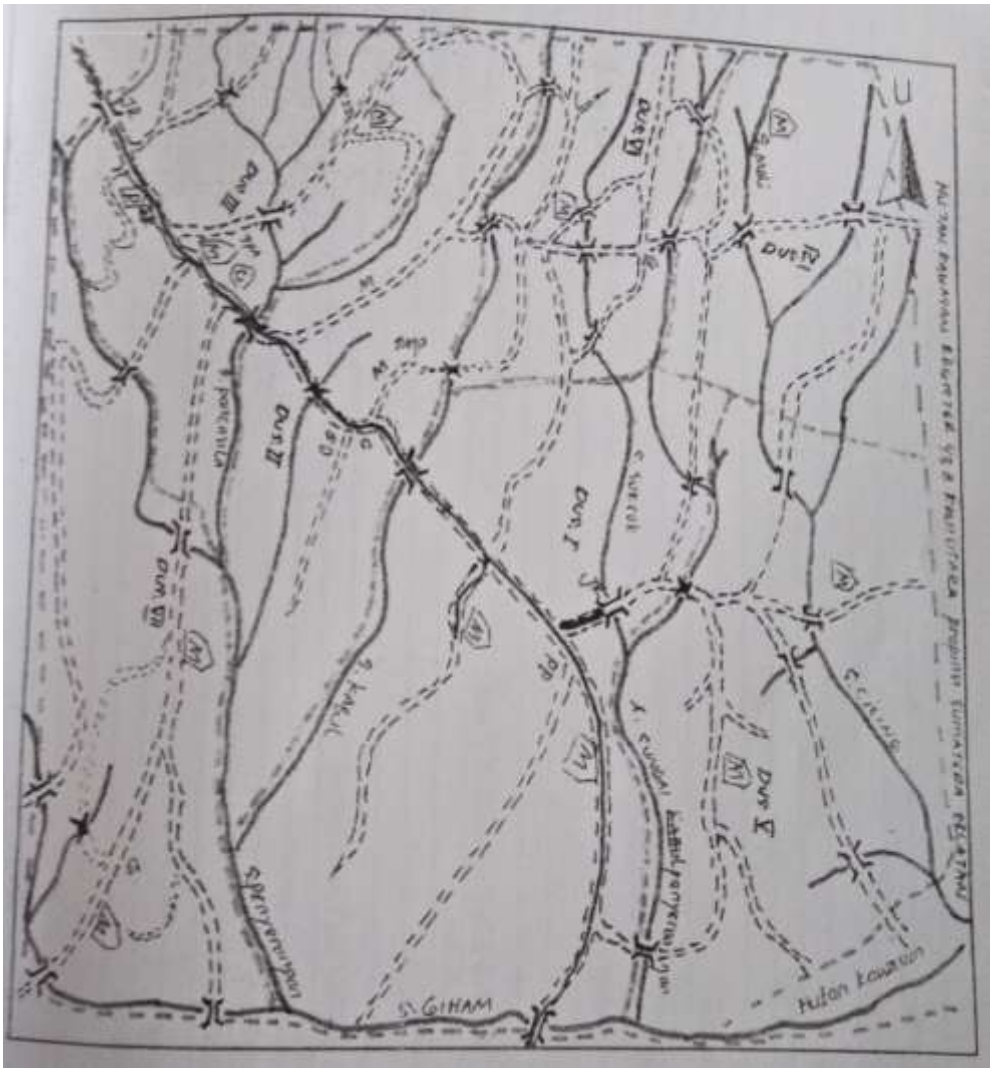

Gambar 3 Peta Wilayah Pekon Argomulyo

Sumber : Dokumen Pekon Argomulyo

Pekon Argomulyo memiliki 7 dusun atau disebut pemangku yaitu pemangku 1, pemangku, pemangku 3, pemangku 4, pemangku 5, pemangku 6, pemangku 7, jajaran pemerintah Pekon Argomulyo adalah:

1.	Peratin	: Harjan S
2.	Juru tulis/ Sekretaris Pekon	: Dadang S S.E.
3.	Kepala urusan Pemerintahan	: Maksum
4.	Kepala urusan ekonomi pembangunan	: Maman BJ
5.	Kepala urusan umum	: Orin Saputra
6.	Kepala urusan perencanaan	: M. Nasir
7.	Kepala urusan kesejahteraan rakyat	: Yunida S.Pd
8.	Kepala urusan keuangan	: Dewi S

Pemerintah Pekon Argomulyo ada 8 orang lulusan SMA dan hanya 2 orang lulusan S1

1. Luas Tanah

Tabel 11 Luas Tanah Berdasarkan Sawah Dan Bukan Sawah

Tahun	Sawah	Bukan sawah	Jumlah
2016	0	956	956
2015	10	948	958

Sumber: BPS Lampung Barat

Luas tanah berdasarkan sawah dan bukan sawah pada Pekon Argomulyo Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2016 luas tanah sawah berkurang dari tahun 2015 untuk sawah menjadi berjumlah 0 dari sebelumnya berjumlah 10 dan yang bukan sawah bertambah dari tahun sebelumnya berjumlah 948 jadi berjumlah 956.

2. Kesejahteraan Keluarga

Tabel 15 Kesejateraan Keluarga Pekon Argomulyo

NO	Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1.	keluarga Prasejahtera	321 keluarga
2.	Keluarga sejahtera 1	121 keluarga
3.	Keluarga sejahtera 2	75 keluarga
4.	Keluarga sejahtera 3	69 keluarga
5.	Keluarga sejahtera 3 plus	31 keluarga
	Total	617 keluarga

Sumber: Profil Pekon Argomulyo

Kesejahteraan keluarga pada Pekon Argomulyo paling banyak pada keluarga prasejahtera dan yang paling rendah adalah keluarga sejahtera 3 tetapi keluarga prasejahtera masih cukup tinggi setengah dari total seluruhnya untuk Pekon Argomulyo ini sehingga masih dikatakan banyak keluarga yang masih belum sejahtera.

3. Sarana Pendidikan

Tabel 16 Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlah
1. Tk/ Paud	1 TK SWASTA
2. SD	1 Sekolah Dasar Negeri
3. SMP	1 Sekolah SMPN

Sumber : Data Pemerintah Pekon Argomulyo

Tabel 17 Data Penduduk Berpendidikan Pekon Argomulyo

Pendidikan	Jumlah
6. Tidak Tamat SD/ Sederajat	175 orang
7. SD	1006 orang
8. Tidak Lulus SMP	64 orang
9. SMP	85 orang
10. SMA	48 orang

Sumber: Monografi Pekon Argomulyo 2017

Berdasarkan dua tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana pendidikan Pekon Argomulyo sudah cukup baik dan jumlah penduduk yang tidak mengenyam pendidikan pun sedikit dan untuk penduduk yang tidak lulus Sekolah Dasar tidak ada di Pekon Argomulyo hanya ada penduduk yang tidak lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

4. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan pada Pekon Argomulyo terdapat satu Puskesdes dan satu pustu dan hanya terdapat 1 bidan dan dilakukan posyandu setiap satu bulan sekali, pendidikan dan kesehatan tentu membutuhkan sosialisasi pada Pekon Argomulyo untuk sosialisasi pendidikan tidak ada sedangkan untuk sosialisasi kesehatan data terkhir sebagai berikut.

Tabel Data Sosialisasi Kesehatan

Waktu	Petugas Penyuluh	Materi
10-01-2017	PUSKESMAS	Tanda-tanda bahaya pada ibu hamil
14-03-2017	PLKB	KB
09-05-2017	PLKB	Alat Kontrasepsi KB
11-07-2017	PUSKESMAS	Gizi Seimbang
19-09-2017	PLKB	Alat kontrasepsi (Kondom)

Sumber: Jadwal Penyuluhan Pekon Argomulyo 2017

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan untuk pelaksanaan pembangunan desa tertinggal khusunya di bidang pelayanan dasar di kaji menggunakan teori struktural fungsional dari Talcot Parsons dengan empat indikator AGIL yaitu adaptasi (Adaptation), tujuan (Goal), integrasi (Integration) dan pemeliharaan pola (Latency), ternyata masih terdapat indikator yang belum terpenuhi dengan baik adalah indikator adaptasi (Adaptation). Dari lima turunan indikator tersebut Pekon Atar Kuwau lebih rendah adaptasinya dibandingkan dengan Pekon Argomulyo sehingga mengakibatkan Pekon tersebut terjadi ketimpangan khususnya pada pelayanan dasar karena adaptasi untuk pembangunan masih sangat rendah dalam bidang pekerjaan, produksi, ekonomi, alokasi program dan kebutuhan masyarakat sehingga menyebabkan pembangunan pelayanan dasar rendah.

Pekerjaan utama masyarakat Pekon Atar Kuwau hanya sebagai petani kopi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, tidak beragam seperti pekerjaan di Pekon Argomulyo Petani Kopi, PNS, buruh tani, dan pedagang serta memiliki pekerjaan tambahan. Sementara produksi di Pekon Atar Kuwau hanya

produksi kopi dan kambing untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang sehingga tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari (jangka pendek), sedangkan Pekon

Argomulyo dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang dan kebutuhan jangka pendek di peroleh dari kopi, kambing, sayur, padi dan gula aren.

Penghasilan masyarakat Pekon Atar Kuwau hanya dari kopi dan dihasilkan pertahun sedangkan Pekon Argomulyo penghasilan masyarakat perhari untuk pedangang, perbulan untuk PNS dan pertahun untuk petani kopi. Alokasi program Pekon Atar Kuwau hanya ada program kesehatan dan Pekon Argomulyo ada program dalam bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan rencana sedang dijalankan bersama bursa inovasi, dalam kebutuhan masyarakat Pekon Atar Kuwau lebih banyak kebutuhan untuk pendidikan 28,3% serta fasilitas Tk, SMP dan SMA untuk kesehatan dibutuhkan tenaga kesehatan yang selalu ada di tempat sedangkan Pekon Argomulyo 22,4% membutuhkan pendidikan dan hanya dibutuhkan fasilitas SMA.

B. Saran

Berdasarkan simpulan untuk pelayanan Pekon Atar Kuwau dan Pekon Argomulyo dalam penelitian ini, maka saran pada penelitian ini diantaranya:

1. Bekerja sama dengan pemerintah kabupaten atau dinas perkebunan kabupaten untuk meremajakan kopi dengan cara di stek batang, karena akan lebih cepat berbuah dan hasil buah kopi antara batang satu dengan yang lain akan sama, untuk meningkatkan produksi kambing maka untuk pakan ternak dapat mengambil dari tanaman di sekitar kopi yang

menjadi tumpangsari, ekonomi dan pengetahuan petani kopi dapat ditingkatkan melalui kerjasama dengan produsen kopi luwak agar penjualan kopi mahal dan dapat mencukupi ekonomi serta memberi pengetahuan tentang biji kopi yang baik seperti apa, karena produsen kopi luwak memiliki standar kematangan kopi. Alokasi program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan rapat dan musyawarah agar didapatkan program yang tepat untuk pembangunan desa serta untuk kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi maka pemerintah desa dapat bekerjasama dengan bursa inovasi yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Lampung Barat dan dengan meningkatnya ekonomi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

2. Pencapaian tujuan pembangunan desa dapat mengacu pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 Bab IX yang mengatur tentang pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, sehingga dapat dilaksanakan pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan sehingga Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dapat sesuai dengan perencanaan pembangunan kabupaten dan undang-undang dan menciptakan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah desa guna mencapai misi dari pembangunan desa.
3. Integrasi dapat diwujudkan dengan cara musyawarah yang melibatkan masyarakat serta mengikutsertakan masyarakat atau bergotonng royong

dalam setiap kegiatan desa, sehingga masyarakat mengerti kebutuhan desa dan mengetahui rencana kerja desa sehingga pemerintah desa dapat bekerjasama dengan masyarakat desa dalam mewujudkan pembangunan desa.

4. Nilai dan norma masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan masyarakat desa yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, serta dapat memanfaatkan program beasisiwa untuk pendidikan dan memanfaatkan program dinas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Manajemen Pembangunan Transportasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Ahmadi, Rulam. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: AR-Ruzz Media

Alwasilah, A.chaedar. 2011. *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitain Kualitatif.* Jakarta: PT.Dunia Pustaka Jaya

Bulkin, Imron dkk. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014.* Jakarta: Kementrian PPN/BAPPENAS

Emzir. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers

Fuad, Anis dan Kandung Septo Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama

Kessa, Wahyudin. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik.* Jakarta: Mitra wacana media

Makmur, Syarief. 2008. *Pemberdayaan sumber daya manusia & efektivitas organisasi kajian penyelenggaraan pemerintahan desa.* Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia.

Mardikanto, Totok & Poerwoko soebianto. 2015. *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta

Maulana, henri D.J. 2009. *Promosi Kesehatan.* Jakarta: ECG

Nugroho, Apriyanto. 2016. *Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Yang Partisipatif Di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: DIVA PRESS

Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: AR-Ruzz Media

Ritzer, George & Dougles. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: PRENADA MEDIA

Soersono, Andreas. 2008. *Sosiologi*. Jakarta: Yudhistira

Sujarweni, Wiratama. 2014. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta : PUSTAKABAPURPRESS

Susanto, Bambang. 2009. *Memacu Infrastruktur Di Tengah Krisis*. Jakarta : Pustaka Bisnis Indonesia

Syahza, Almasdi., 2012. *Model Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau (Tahun II)*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian Universitas Riau

Jurnal

Afiyati, Yanti. 2008, *Jurnal Kesehatan Indonesia*. vol (12), no (2), Validitas dan Reliabilitas dalam penelitian kualitatif

Andini, Ully hikmah dkk. *Jurnal Administrasi Publik (JAP*), Vol 2, No. 12 PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DARI DESA TERTINGGAL MENUJU DESA TIDAK TERTINGGAL (Studi Di Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati)

Hariyati, Emi. 2015, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. vol (3), no (4), Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai

Magta, Mutiara. 2013. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol (7), no (2). Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara Pada Anak Usia Dini

Muhtar dkk. 2011. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol. 16 No. 01. Masyarakat Desa Tertinggal

Junidis. 2015. Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol 3, no 4, *Kualitas Pelayanan Publik di Kecamtan Kayan Selatan Kabupaten Malinau*

Setiawan,Andre. 2017. *Jurnal AGORA*. Vol 5 No 3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja

Sidi, Purnomo. 2014. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, vol 3, no 1, Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional

Tampi, Bryan J. 2014. *Jurnal Acta Diumai*. Vol 3 No 4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan.

Undang-undang

Redaksi sinar grafika. 2014. Undang Undang Desa Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Jakarta: Sinar Grafika

Redaksi sinar grafika. Undang Undang Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Jakarta: Sinar Grafika

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003

Undang-undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermendesaPDTTrans) nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun desa

Referensi lain

Skripsi Lina Marlina 2014 Analisis Ekonomi Kopi Rakyat dan Peranannya Terhadap Perekonomian Wilayah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung

www.BAPPENAS.go.id

datin.kemendesa.go.id

www.hukumonline.com

https://lampungbaratkab.bps.go.id/